

PERAN ETIKA PROFESI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN

¹Indriana Nurul Hasanah (C100220165), ²Shelviana Putri Atmaja (C100220172), ³Farikha Sabilillah (C100220208), ⁴Arrumaisha Rizkita (C100220218), ⁵Meyna Alisiya Putri (C100220219), ⁶Arief Budiono

c100220172@student.ums.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penerapan etika profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Etika profesi yang baik dapat mendorong PNS untuk melaksanakan tugas mereka dengan integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, penerapan etika profesi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran etika profesi dalam meningkatkan kinerja PNS di lingkungan pemerintahan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan etika profesi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan PNS, pimpinan, dan pihak terkait lainnya, serta studi dokumentasi terkait peraturan dan kode etik profesi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema yang relevan dengan penerapan etika profesi dan kinerja PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika profesi yang baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja PNS, dengan menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan etika profesi antara lain kesadaran individu, budaya organisasi, kepemimpinan, kebijakan yang ada, serta pengaruh lingkungan sosial dan politik. Kesimpulannya, penerapan etika profesi yang kuat di kalangan PNS sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman etika melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan etika profesi. Selain itu, budaya organisasi yang mendukung etika profesi dan teladan yang baik dari pemimpin juga menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Kata Kunci: Etika Profesi, Pegawai Negeri Sipil, Kinerja, Pemerintahan, Faktor Penerapan.

Article History

Received: April 2025
Reviewed: April 2025
Published: April 2025

Plagiarism Checker
No 234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI
: 10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author
Publish by :
CAUSA**



This work is licensed
under a [Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

A. Pendahuluan

Etika profesi merupakan suatu pedoman yang penting dalam setiap profesi, tidak terkecuali dalam dunia kepegawaian. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), etika profesi bukan hanya menjadi landasan dalam menjalankan tugas, tetapi juga menjadi indikator utama dalam menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik dan efisien. Etika profesi di lingkungan pemerintahan menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam pembentukan integritas dan profesionalisme PNS. Peran etika profesi dalam meningkatkan kinerja PNS sangat penting karena setiap keputusan yang diambil oleh seorang pegawai negara akan berdampak langsung terhadap masyarakat, baik dalam hal pelayanan maupun kebijakan yang diimplementasikan (Suryani & Amenah, 2024). Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan etika profesi dalam setiap tindakan pegawai negara akan menentukan kualitas kinerja mereka dan hasil yang dicapai oleh pemerintah.

Di dalam dunia pemerintahan, setiap PNS dituntut untuk memiliki sikap profesional, tidak hanya dalam aspek teknis pekerjaan, tetapi juga dalam aspek moral dan etika. Kinerja PNS sangat dipengaruhi oleh seberapa besar mereka memahami dan menerapkan etika profesi dalam aktivitas sehari-hari. Etika profesi yang baik akan menciptakan suasana kerja yang sehat dan kondusif, serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai. Di sisi lain, kurangnya pemahaman dan penerapan etika profesi dapat berakibat pada terjadinya penyalahgunaan wewenang, penurunan kualitas pelayanan, serta merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan (Paisa et al., 2019).

Di era modern ini, di mana teknologi dan informasi berkembang sangat pesat, tantangan yang dihadapi oleh PNS dalam menjaga etika profesinya semakin besar. Pengaruh media sosial, transparansi informasi, dan perkembangan digital lainnya mempengaruhi cara kerja dan pola komunikasi dalam pemerintahan. PNS yang berperan sebagai pelayan publik harus dapat menjaga profesionalisme dan integritasnya meskipun terpapar dengan berbagai pengaruh eksternal yang dapat menggoyahkan etika kerja mereka. Untuk itu, penting adanya pendidikan dan pelatihan etika profesi yang berkelanjutan bagi PNS agar mereka dapat menghadapi tantangan tersebut dengan lebih bijak dan profesional (Pulungan, 2011).

Selain itu, penerapan etika profesi yang konsisten di setiap level pemerintahan akan berkontribusi besar dalam terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik harus memastikan bahwa semua pegawai negara menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi standar etika yang berlaku. Penerapan etika profesi juga akan berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang optimal dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Peningkatan kinerja PNS dengan memperhatikan etika profesi akan mendorong tercapainya pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Simamora, 2022).

Dengan demikian, peran etika profesi dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan tidak hanya relevan untuk kepentingan internal pemerintahan itu sendiri, tetapi juga untuk kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pentingnya penerapan etika profesi dalam meningkatkan kinerja PNS, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan implementasi etika profesi di kalangan pegawai negeri sipil.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam penerapan etika profesi dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah PNS, pimpinan, serta pihak terkait lainnya di instansi pemerintah untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai pemahaman, penerapan, dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan etika profesi. Selain itu, data juga akan dikumpulkan melalui studi dokumentasi seperti peraturan internal, kode etik profesi, serta laporan kinerja PNS. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data yang dikumpulkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara penerapan etika profesi dan kinerja PNS (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Etika Profesi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan

Etika profesi memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan, etika profesi mengatur norma-norma serta prinsip yang harus diikuti oleh setiap individu dalam melaksanakan tugas profesinya. Bagi PNS, etika profesi bukan hanya mencakup masalah integritas, tetapi juga mencakup aspek pelayanan publik yang berkualitas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengatur kewajiban PNS untuk bekerja dengan profesionalisme, integritas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan penerapan etika profesi yang baik, kinerja PNS dapat meningkat secara signifikan, dan pemerintah dapat lebih dipercaya oleh masyarakat (Sutoro et al., 2020).

Salah satu aspek penting dari penerapan etika profesi adalah kemampuannya dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif. Dalam organisasi pemerintahan, suasana kerja yang baik sangat berpengaruh terhadap kinerja individu dan kelompok. Etika profesi mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, dan saling menghargai yang pada gilirannya menciptakan hubungan yang harmonis antara PNS. Jika hubungan antarpegawai berjalan dengan baik, kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pelayanan publik yang optimal, akan semakin efektif dan efisien. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, salah satu kewajiban PNS adalah menjaga perilaku dan hubungan yang baik di dalam lingkungan kerja. PNS yang memegang teguh prinsip-prinsip etika profesi akan lebih fokus pada tugas mereka dan meminimalisir konflik, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kinerja yang lebih tinggi.

Etika profesi juga berperan dalam pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. PNS sering kali dihadapkan pada keputusan-keputusan yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, baik itu dalam kebijakan publik maupun dalam pelayanan administratif. Oleh karena itu, etika profesi mengharuskan setiap pegawai untuk

mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penerapan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, objektivitas, dan transparansi dalam pengambilan keputusan akan menghasilkan keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengamanatkan bahwa setiap keputusan administratif harus berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam jangka panjang, penerapan etika profesi yang tepat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang pada gilirannya akan memperbaiki kinerja PNS (Andini et al., 2017).

Penerapan etika profesi juga memainkan peran besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. PNS sebagai pelayan publik memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Dengan mematuhi kode etik profesi, PNS akan lebih mengutamakan kepuasan masyarakat dalam setiap aspek tugas mereka. Etika profesi menekankan pentingnya kesabaran, empati, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan. Misalnya, dalam konteks administrasi pemerintahan, PNS yang menerapkan etika profesi akan lebih teliti, cekatan, dan responsif dalam memproses dokumen, memberikan informasi yang akurat, serta menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan dengan standar yang tinggi dan menjunjung nilai-nilai keadilan dan transparansi. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dapat meningkat, yang berdampak pada peningkatan citra pemerintah di mata publik (Husna et al., 2024).

Etika profesi juga berperan dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya publik. Dalam pemerintahan, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Penerapan etika profesi yang kuat akan mengurangi potensi terjadinya praktik-praktik tidak etis yang dapat merugikan negara dan masyarakat. PNS yang berpegang pada prinsip-prinsip etika profesi akan lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran dan sumber daya publik, serta selalu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengharuskan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan transparansi yang terjaga, potensi korupsi dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat yakin bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan benar (Amelia & Setyawati, 2023).

Selain itu, etika profesi juga berfungsi untuk menjaga integritas PNS dalam menghadapi berbagai tantangan dan tekanan yang muncul dalam pekerjaan mereka. PNS sering kali menghadapi godaan untuk terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis, seperti nepotisme, suap, atau kolusi, yang dapat merugikan masyarakat dan mencederai citra pemerintah. Etika profesi memberikan landasan moral yang kuat bagi PNS untuk tetap teguh pada prinsip keadilan dan integritas. PNS yang mampu menghadapi tekanan eksternal dan tetap menjalankan tugas sesuai dengan kode etik yang berlaku akan semakin dihormati dan dihargai oleh masyarakat (Ananda et al., 2023). Dalam hal ini, integritas merupakan salah satu nilai utama yang ditekankan dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mengatur bahwa PNS harus memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya (MH, 2020).

Etika profesi dalam pemerintahan juga penting untuk menjaga profesionalisme di kalangan PNS, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya manusia dan karier. Dalam lingkungan pemerintahan, PNS diharapkan memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Etika profesi mengajarkan pentingnya pengembangan diri secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pendidikan, serta menjaga kualitas kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. PNS yang memiliki kompetensi yang baik akan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengamanatkan pengembangan kompetensi PNS agar dapat bekerja secara profesional dan efisien dalam melaksanakan tugas negara (Effendi, 2012).

Dalam dunia pemerintahan, etika profesi juga berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan prediktabilitas dalam kebijakan dan keputusan yang diambil oleh PNS. Dengan adanya pedoman etika profesi yang jelas, setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh PNS dapat diprediksi dan diharapkan, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan percaya. Hal ini juga menciptakan rasa keadilan yang lebih besar, karena setiap orang diperlakukan sesuai dengan standar yang sama. Dengan adanya pedoman yang jelas, pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks dapat dilakukan dengan lebih objektif dan adil. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengharuskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh PNS harus berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang jelas (Langgeng & Wilasari, 2023).

Etika profesi juga memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam pemerintahan yang baik, komunikasi yang terbuka dan jujur antara PNS dan masyarakat sangat diperlukan. Penerapan etika profesi memastikan bahwa PNS selalu mengutamakan transparansi dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah memahami kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lebih percaya bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa pemerintah wajib memberikan akses informasi yang akurat dan transparan kepada publik. Hal ini sangat bergantung pada etika profesi yang dijalankan oleh PNS dalam setiap lini pemerintahan (Harefa & Sinambela, 2012).

Secara keseluruhan, etika profesi memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan. Penerapan etika profesi yang baik tidak hanya memperbaiki suasana kerja, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan pelayanan publik, tetapi juga menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan profesional. Oleh karena itu, etika profesi bukan hanya sekadar pedoman moral, tetapi juga merupakan faktor kunci dalam mewujudkan kinerja PNS yang optimal dan berorientasi pada kepentingan publik. Penerapan etika profesi yang kuat akan memperbaiki citra pemerintah, memperkuat kepercayaan

masyarakat, dan akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik dan profesional.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Etika Profesi di Kalangan Pegawai Negeri Sipil

Penerapan etika profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari individu itu sendiri, termasuk karakter, nilai-nilai pribadi, dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip etika yang berlaku. Setiap PNS diharapkan memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya integritas, kejujuran, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Faktor pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada PNS juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku etis mereka. Ketika individu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap etika profesi, maka penerapannya dalam kegiatan sehari-hari akan lebih maksimal. Namun, tidak jarang individu yang kurang memiliki pemahaman atau komitmen terhadap nilai-nilai tersebut, yang bisa menghambat penerapan etika profesi secara konsisten.

Selain faktor internal, organisasi tempat PNS bekerja juga sangat mempengaruhi penerapan etika profesi. Lingkungan organisasi yang transparan, mendukung budaya etika yang kuat, dan memiliki sistem pengawasan yang efektif akan memperkuat penerapan etika di kalangan PNS. Kebijakan yang jelas mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika, dapat menumbuhkan budaya etis di dalam organisasi. Faktor eksternal juga turut berperan, seperti tekanan dari masyarakat, politik, serta perkembangan sosial yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku PNS. Ketika faktor internal dan eksternal ini bekerja secara harmonis, maka penerapan etika profesi di kalangan PNS dapat berjalan dengan baik, mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi penerapan etika profesi di kalangan PNS:

a. Kesadaran dan Pemahaman Etika Profesi

Kesadaran dan pemahaman tentang etika profesi adalah faktor utama yang mempengaruhi penerapannya. PNS yang memiliki pemahaman yang baik mengenai kode etik profesi dan pentingnya etika dalam pekerjaan mereka akan lebih cenderung untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan dan pelatihan tentang etika profesi sangat berpengaruh dalam membentuk kesadaran tersebut. PNS yang dilatih untuk mengenali nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab akan lebih mudah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam tugas sehari-hari mereka. Sebaliknya, jika PNS kurang memiliki pemahaman atau tidak disosialisasikan dengan baik mengenai etika profesi, mereka mungkin tidak menyadari pentingnya penerapan etika dalam pekerjaan mereka, yang dapat mengarah pada pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam menjalankan tugas.

b. Budaya Organisasi

Budaya organisasi tempat PNS bekerja memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penerapan etika profesi. Budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai etika, seperti transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran, akan mendorong PNS untuk mematuhi etika profesi dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Jika

budaya organisasi mendukung perilaku etis, maka PNS akan merasa lebih termotivasi untuk menjaga integritas mereka dalam bekerja. Di sisi lain, jika budaya organisasi lebih menekankan pada hasil kerja tanpa memperhatikan cara mencapainya, atau bahkan membiarkan praktek-praktek yang tidak etis terjadi tanpa sanksi yang jelas, maka PNS mungkin terpengaruh untuk mengabaikan kode etik dan mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok (Achmad, 2022).

c. Kepemimpinan dan Teladan dari Atasan

Pemimpin dalam sebuah organisasi pemerintahan memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk dan menerapkan etika profesi di kalangan PNS. Pemimpin yang memberikan teladan dengan menunjukkan perilaku etis akan mendorong PNS untuk mengikuti jejak mereka. Sebaliknya, pemimpin yang tidak mengindahkan etika atau terlibat dalam praktik tidak etis dapat menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pelanggaran etika di tingkat bawah. Jika atasan atau pimpinan memberikan contoh yang buruk, misalnya dalam hal penyalahgunaan wewenang atau pengambilan keputusan yang tidak adil, maka hal ini akan memengaruhi sikap dan perilaku para bawahannya. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk menjadi teladan dalam menerapkan etika profesi, sehingga seluruh anggota organisasi dapat mengikuti dan melaksanakannya dengan konsisten.

d. Kebijakan dan Regulasi yang Ada

Kebijakan internal dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga tempat PNS bekerja juga berperan besar dalam mempengaruhi penerapan etika profesi. Kebijakan yang jelas, tegas, dan konsisten dalam mengatur tata cara bekerja, pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran etika profesi akan membantu mendorong penerapan etika profesi secara lebih sistematis. Jika kebijakan atau regulasi yang ada tidak mendukung penerapan etika profesi atau tidak cukup kuat dalam memberikan sanksi bagi pelanggaran etika, maka PNS mungkin merasa tidak ada konsekuensi nyata dari pelanggaran yang dilakukan, yang pada akhirnya dapat menurunkan motivasi mereka untuk bertindak sesuai dengan etika profesi (Yuliandri & Kristiawan, 2017).

e. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Politik

Lingkungan sosial dan politik di sekitar PNS juga dapat mempengaruhi penerapan etika profesi. PNS sering kali menghadapi tekanan dari berbagai pihak, baik itu dari keluarga, teman sejawat, atau bahkan dari atasan politik yang memiliki kepentingan tertentu. Dalam beberapa situasi, tekanan ini dapat membuat seorang PNS kesulitan untuk mempertahankan etika profesinya. Misalnya, dalam lingkungan yang penuh dengan praktik korupsi atau nepotisme, PNS mungkin merasa tertekan untuk mengikuti arus tersebut meskipun itu bertentangan dengan kode etik profesi mereka. Oleh karena itu, lingkungan sosial yang mendukung praktik etis sangat penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pemberantasan praktik-praktik negatif di lingkungan sosial dan politik dapat membantu meningkatkan penerapan etika profesi di kalangan PNS (Karisa, 2022).

f. Pendidikan dan Pelatihan Etika Profesi

Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan tentang etika profesi sangat penting dalam membentuk karakter dan kesadaran moral PNS. Pelatihan mengenai

pentingnya etika dalam pelayanan publik, penegakan hukum, dan prinsip-prinsip akuntabilitas harus menjadi bagian dari program pengembangan karir PNS. Ketika PNS mendapatkan pelatihan secara rutin tentang bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi masalah etika dalam pekerjaan mereka, mereka akan lebih siap untuk menghadapi dilema etis yang mungkin timbul. Pelatihan ini juga membantu untuk memperbaharui pengetahuan mereka mengenai perubahan kebijakan, hukum, dan regulasi yang relevan dengan etika profesi, serta memberikan wawasan mengenai bagaimana menerapkannya dalam konteks yang berbeda (Farhanuddin et al., 2021).

g. Insentif dan Sanksi

Sistem insentif dan sanksi juga berperan dalam memotivasi PNS untuk mengikuti etika profesi. Insentif yang diberikan kepada PNS yang menjalankan tugas dengan etis dan profesional, seperti penghargaan atau kenaikan pangkat, akan mendorong mereka untuk terus mempertahankan integritas dan etika kerja. Sebaliknya, sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran etika, baik berupa teguran, disiplin, atau pemecatan, akan memberikan efek jera dan mencegah tindakan tidak etis. Tanpa adanya sanksi yang tegas, penerapan etika profesi bisa menjadi kurang efektif, karena PNS mungkin merasa bahwa pelanggaran etika tidak akan berdampak signifikan bagi karir atau status mereka (Jamaluddin & Andriani, 2019).

h. Teknologi dan Akses Informasi

Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi juga mempengaruhi penerapan etika profesi. Di era digital saat ini, PNS memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi yang berpotensi mempengaruhi cara mereka bekerja dan mengambil keputusan. Penggunaan teknologi yang tidak etis, seperti penyalahgunaan data pribadi atau manipulasi informasi, dapat merusak integritas seorang PNS. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan pelatihan mengenai etika penggunaan teknologi dan informasi agar PNS dapat menggunakan teknologi dengan cara yang sesuai dengan standar etika profesi yang berlaku (Suryani & Amenah, 2024).

Secara keseluruhan, penerapan etika profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Di tingkat individu, kesadaran pribadi akan pentingnya etika profesi memegang peran utama dalam memastikan bahwa setiap PNS menjalankan tugas dengan integritas, akuntabilitas, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Namun, faktor tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh budaya organisasi yang kondusif. Organisasi yang menanamkan nilai-nilai etika yang kuat, serta kepemimpinan yang memberikan teladan baik, akan memperkuat penerapan etika profesi di kalangan PNS. Selain itu, kebijakan yang jelas dan tegas dalam hal pengawasan dan sanksi juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi etika profesi.

Faktor eksternal seperti lingkungan sosial-politik dan sistem pendidikan serta pelatihan juga turut memberikan dampak besar pada penerapan etika profesi. Lingkungan sosial yang kondusif dan bebas dari praktik korupsi atau tekanan negatif akan memudahkan PNS dalam mempertahankan standar etika mereka. Demikian pula, pelatihan yang berkelanjutan tentang etika profesi akan meningkatkan pemahaman PNS terhadap peran penting etika dalam pelayanan publik. Dengan memperhatikan dan memperkuat semua faktor ini secara bersamaan, penerapan etika profesi di kalangan PNS

diharapkan dapat lebih maksimal. Hal ini pada gilirannya akan mendorong peningkatan kinerja PNS dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih profesional, dan lebih dapat dipercaya oleh masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan efektif.

D. Kesimpulan

Penerapan etika profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja di lingkungan pemerintahan. Etika profesi yang diterapkan dengan baik dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik secara signifikan, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, etika profesi juga berfungsi untuk menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif, yang mendukung PNS dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Lingkungan yang didasari oleh nilai-nilai etika yang kuat akan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, yang seringkali menjadi akar dari masalah birokrasi di pemerintahan. Dalam konteks ini, penerapan etika profesi membantu PNS untuk bekerja dengan integritas, akuntabilitas, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika profesi yang baik, PNS tidak hanya dapat memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi juga berkontribusi langsung pada tercapainya tujuan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. Dengan etika profesi yang kuat dan konsisten, PNS akan lebih mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat, menjaga kepercayaan publik, serta mengoptimalkan kinerja mereka dalam tugas pemerintahan, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih profesional dan dapat diandalkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan etika profesi di kalangan PNS meliputi kesadaran individu, budaya organisasi, kepemimpinan yang ada, kebijakan yang berlaku, serta pengaruh lingkungan sosial dan politik yang lebih luas. Kesadaran individu PNS terhadap pentingnya etika profesi menjadi faktor utama yang mempengaruhi bagaimana mereka menjalankan tugas mereka dalam institusi pemerintahan. Namun, kesadaran ini tidak akan optimal tanpa adanya budaya organisasi yang mendukung penerapan etika profesi, di mana nilai-nilai etika ditanamkan dan diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek operasional instansi pemerintah. Selain itu, kepemimpinan yang berintegritas dan memberikan contoh yang baik sangat berpengaruh dalam menegakkan standar etika di lingkungan kerja. Kebijakan yang jelas dan tegas, serta sistem insentif dan sanksi yang ada, turut menentukan apakah PNS dapat mematuhi etika profesi dengan baik atau tidak. Pengaruh lingkungan sosial-politik yang dapat memengaruhi perilaku etis juga tidak bisa diabaikan, karena tekanan eksternal sering kali mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil oleh PNS. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja PNS dan memastikan penerapan etika profesi yang lebih baik, dibutuhkan upaya yang terus-menerus untuk memperkuat dan menegakkan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan tentang etika profesi, penguatan kebijakan yang mendukung perilaku etis, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2022). Peranan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri Sipil Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Camat Sukarami Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial*, 17(2), 99-107.
- Amelia, H., & Setyawati, K. (2023). Analisis Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kelurahan Bidara Cina Kota Administrasi Jakarta Timur. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 6(2), 106-120.
- Ananda, R., Fitria, S., & Sari, C. D. M. (2023). Peran Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Aceh Barat. *Regress: Journal of Economics & Management*, 3(1), 47-50.
- Andini, R., Amin, M. J., Dyastari, L., Sos, S., & Si, M. (2017). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di kantor camat tenggarong kabupaten kutai kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 1571-1582.
- Effendi, A. (2012). *Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Badan Kepegawaian Kota Pasuruan)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Farhanuddin, A. F., Setia, A. A. P., & Jauza, D. (2021). Penerapan etika pelayanan publik dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 64-74.
- Harefa, H. Y. A., & Sinambela, T. (2012). Pengaruh Pembinaan terhadap Motivasi Kerja dan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi: Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai). *Jurnal Bina Praja*, 4(3), 207-216.
- Husna, N. A., Aqilah, N. S., Novita, N. F., & Hanoselina, Y. (2024). Efektivitas Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 2(1), 13-20.
- Jamaluddin, J., & Andriani, A. (2019). Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Sebagai Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tentang Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Malunda. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 3(2).
- Karisa, Y. D. A. (2022). *UPAYA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH BERLAKUNYA UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN (STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY)* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Langgeng, Y. S., & Wilasari, M. F. (2023). Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi (Tinjauan Literatur). *Nusantara Innovation Journal*, 2(1), 103-113.
- MH, S. (2020). PERANAN DIKLAT JABATAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN. *Jurnal Yustitia*, 14(2), 35-49.
- Paisa, L., Gosal, R., & Monintja, D. (2019). Etika pemerinthan dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

- PULUNGAN, I. (2011). Strategi Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(1), 82-101.
- Simamora, S. (2022). Peran Pendidikan Pancasila Dalam Pembentukan Etika Profesi Di Lingkungan Akademik. *Judge: Jurnal Hukum*, 3(01), 34-46.
- Suryani, R. A., & Amenah, A. (2024). Peran Etika Administrasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Camat Kecamatan Sako Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial*, 19(2), 146-161.
- Sutoro, M., Mawardi, S., & Sugiarti, E. (2020). Pengaruh kepemimpinan, kompensasi, budaya organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(4), 411-420.
- Yuliandri, J., & Kristiawan, M. (2017). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kinerja Guru. *Jurnal Dosen Universitas PGRI Palembang*.